



PEMBERDAYAAN EKONOMI KERAKYATAN BERDASARKAN AJARAN TAMANSISWAMENUJU REVOLUSI INDUSTRI 4.0

Rakhmi Widayati, S.Sos¹, Ayu Dwi Nugraheni, S.Si²
Program Studi Penelitian dan Evaluasi Pendidikan,
Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa, Yogyakarta, Indonesia.
e-mail : rakhmiwidayati30@admin.smk.belajar.id

ABSTRAK

Ekonomi kerakyatan merupakan kegiatan perekonomian atau usaha yang dilakukan oleh rakyat yang secara swadaya mengelola sumberdaya ekonomi yang mampu diusahakan dan dikuasainya, mereka mengharapkan bisa terpenuhi kebutuhan dasar keluarga dan tidak mengganggu kepentingan masyarakat sekelilingnya. Ekonomi kerakyatan dapat dikatakan suatu sistem yang berbasis pada kekuatan ekonomi rakyat. Ekonomi kerakyatan sesuai dengan Ajaran Ki Hajar Dewantara yang pada prinsipnya bahwa yang kita bangun adalah rakyat bukan sekedar ekonominya. Kemajuan dan perkembangan ekonomi haruslah untuk mendukung kemajuan harkat martabat rakyat, dari sinilah dikembangkan paham ekonomi kerakyatan. Dasar ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi dari rakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat, dijiwai asas kekeluargaan, dan koperasi merupakan tulang punggung dan bagian integral dari perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan yang perlu dikembangkan perannya dalam pembangunan nasional, dan ini menjadi dasar ekonomi menuju era revolusi industri 4.0

Kata Kunci : Ekonomi Kerakyatan, Ajaran Tamansiswa, Revolusi Industri 4.0

1. PENDAHULUAN

Ekonomi masyarakat Indonesia sangat beragam sesuai dengan kultur dan struktur masyarakatnya. Kondisi masyarakat sangat dipengaruhi oleh tingkat Pendidikan, ekonomis, sosial, budaya. Kondisi ini juga akan terlihat pada perilaku ekonomi masyarakat, Pendidikan yang rendah akan berdampak pada perilaku ekonomi yang sederhana, dan pendidikan tinggi juga akan terlihat pada perilaku ekonomi yang lebih kompleks.

Stratifikasi sosial dalam masyarakat terdiri dari stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan, merupakan stratifikasi sosial yang dapat diperjuangkan, stratifikasi berdasarkan kehormatan, artinya jenis ini pada umumnya berlaku pada masyarakat dengan kepemimpinan karismatik. Maksudnya adalah, masyarakat dipimpin oleh seorang tokoh masyarakat, yang memiliki kedudukan paling asli di masyarakat, karena diperoleh atas penilaian terhadap karisma individu itu sendiri yang dinilai layak menjadi pemimpin kekuasaan, stratifikasi berdasarkan Pendidikan adalah bahwa pendidikan merupakan *social elevator* atau perangkat sosial yang membantu masyarakat untuk melakukan mobilitas sosial atau perpindahan dari status bawah menuju status atas.

Melalui pendidikan, seseorang dapat meningkatkan pola pikir dan keahliannya yang kemudian akan menguasai bidang pekerjaan dan meningkatkan status sosialnya, stratifikasi sosial berdasarkan kekayaan hal tersebut dapat menjadi dasar pembentukan stratifikasi, karena adanya perbedaan kemampuan dalam pemenuhan kebutuhan, yang



berkaitan dengan terbatasnya keahlian, modal dan akses. Kemudian, ada jenis lainnya dari stratifikasi sosial, yakni berdasarkan keturunan. Stratifikasi ini dasar pembentukannya berdasarkan keturunan atau kelahiran dari individu tertentu. Sistem ini biasanya terdapat pada daerah yang menerapkan sistem pemerintahan kerajaan atau monarki. Menurut seorang ilmuwan yakni David Brusky, status keturunan atau *ascribed* status merupakan status yang dimiliki individu secara permanen, atau melekat selama masa hidupnya.

Ekonomi kerakyatan Menurut Mubaryo, dalam bukunya yang berjudul : Reformasi Sistem Ekonomi (dari Kapitalis Menuju Ekonomi Kerakyatan), menyatakan bahwa ekonomi kerakyatan adalah ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil. Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu. Saat ini di dunia berkembang banyak konsep tentang sistem ekonomi yang bisa diterapkan. Tiap negara dapat memilih mana sistem ekonomi yang tepat sesuai kondisi negara tersebut. Negara kita telah lama dikenal mengimplementasikan Ekonomi Kerakyatan.

Beberapa hal yang menjadi pertimbangan dilaksanakan sistem ekonomi kerakyatan :

- a. Bagaimana sistem kepemilikan terhadap sumber daya dan faktor-faktor produksi dinegara tersebut
- b. Dalam koridor kompetisi, bagaimana keluwesan masyarakat untuk bersaing di antara sesamanya, juga bagaimana mereka bersikap saat menerima imbal jasa karena prestasikerjanya
- c. Sejauh mana kadar pemerintah untuk berperan dalam merencanakan, mengatur, danmengarahkan kegiatan perekonomian dan bisnis secara umum.

Berdasarkan uraian di atas di Desa Tepansari, Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo Jawa Tengah merupakan salah satu desa yang menerapkan sistem ekonomi kerakayatan yang sangat kental, sebuah desa dengan sumber daya yang terbatas, faktor faktor produksi yang baik, dengan tingkat keluwesan dalam persaingan antar sesama dan keterlibatan pemerintah yang sangat baik dalam merencanakan, mengatur dan mengarahkan perekonomian masyarakat. Komitmen yang tinggi dari masyarakat untuk meningkatkan perekonomian.

Adapun kondisi riil masyarakat Desa Tepansari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo terlihat dalam tabel berikut :

TABEL 1		
DATA STATISTIK		
DESA TEPANSARI KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH		
NO	KETERANGAN	JUMLAH PENDUDUK
1	KEPALA KELUARGA	527
2	JIWA	1671



TABEL 2

DATA TINGKAT PENDIDIKAN

DESA TEPANSARI KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH

NO	PENDIDIKAN	JUMLAH	%	KET
1	BELUM SEKOLAH	260	15.56	
2	SD	366	21.90	
3	SLTP	116	6.94	
4	SLTA	912	54.58	
5	DIPLOMA	17	1.02	
TOTAL		1671	100.00	

TABEL 3

DATA JENIS PEKERJAAN

DESA TEPANSARI KECAMATAN LOANO, KABUPATEN PURWOREJO, JAWA TENGAH

NO	JENIS	JUMLAH	KETERANGAN
1	WIRASWASTA	220	13.17
2	PELAJAR/MAHASISWA	279	16.70
3	BURUH	59	3.53
4	PEDAGANG	28	1.68
5	PETANI/PEKEBUN	447	26.75
6	KARYAWAN SWASTA	353	21.13
7	PENSIUNAN	3	0.18
8	GURU	5	0.30
9	PEGAWAI NEGERI	6	0.36
10	PERANGKAT DESA	15	0.90
11	Lainnya	256	15.32
JUMLAH		1671	100.00

Merujuk pada keterangan diatas maka penulis tertarik untuk membuat makalah dengan judul Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan berdasarkan ajaran Tamansiswa menuju revolusi industri 4.0 di Desa Tepansari, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Dengan permasalahan yang diambil adalah bagaimana Implementasi Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berdasarkan ajaran Tamansiswa menuju revolusi industri 4.0 di Desa Tepansari, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah. Adapun tujuan dari penulisan peper ini untuk mengetahui Pemberdayaan ekonomi kerakyatan berdasarkan ajaran Tamansiswa menuju revolusi



industri 4.0 di Desa Tepansari, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah.

2. METODE

Penulisan makalah ini menggunakan metode tinjauan literatur (*library research*). Dimana Sistem Ekonomi Kerakyatan pertama kali dicetuskan oleh Bapak Proklamator kita, Drs. Mohammad Hatta. Gagasan ini merupakan sebuah konsep politik dalam bidang perekonomian, di mana pusatnya adalah rakyat.

Konvensi ILO (International Labour Organization) yang ke-169 pada tahun 1989 lalu mendefinisikan Ekonomi Kerakyatan sebagai sistem ekonomi tradisional yang menjadi fondasi bagi kehidupan masyarakat lokal dalam mempertahankan kehidupannya. Pengertian tersebut dikembangkan berdasarkan pada keterampilan dan pengetahuan masyarakat lokal dalam mengelola penghidupan serta lingkungannya.

Sistem Ekonomi Kerakyatan adalah suatu sistem perekonomian yang berlandaskan pada ekonomi rakyat sebagai kekuatannya. Ekonomi rakyat sendiri merupakan kegiatan ekonomi yang dikerjakan oleh rakyat dengan pengelolaan berbagai sumber daya ekonomi secara swadaya, tergantung pada apa saja yang dapat mereka usahakan dan kuasai. Aktivitas ekonomi tersebut kemudian diwujudkan dengan munculnya Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di tiga sektor, yaitu, primer, sekunder, dan tersier. Sektor primer yang digarap UMKM meliputi pertanian, perikanan, dan peternakan.. Dalam sejarahnya, seperti telah disebutkan di atas bahwa kemunculan Sistem Ekonomi Kerakyatan di Indonesia dimotori oleh Bung Hatta. Kala itu, pada tahun 1933, dalam kapasitasnya sebagai negarawan dan salah satu pendiri Republik Indonesia, beliau membuat sebuah tulisan berjudul Ekonomi Rakyat dalam Bahaya. Buah pemikiran Pak Hatta ini kemudian menjadi dasar dari konsep perekonomian Indonesia. Pak Hatta juga dikenal memiliki gagasan tentang konsep koperasi. Badan usaha dengan asas kekeluargaan inilah yang menjadi salah satu ciri Sistem Ekonomi Kerakyatan. Telah menjadi pemikiran Bung Hatta juga untuk membangun ekonomi nasional yang berlandaskan pada ideologi dan budaya bangsa, yaitu Pancasila dan gotong royong.

Meski gagasan tentang Ekonomi Kerakyatan telah lama diungkapkan Bung Hatta, tetapi penerapan sistem ini baru dilakukan enam dekade kemudian, tepatnya pada tahun 1999. Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1998 disinyalir sebagai pemantik dari keputusan tersebut. Ketika itu pemerintah bertekad kuat ingin menerapkan Sistem Ekonomi Kerakyatan dengan mengeluarkan aturan berupa Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat (Tap MPR) Nomor IV/MPR/1999 tentang Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN).

Menurut Mubyarto tokoh ekonomi kerakyatan ekonomi rakyat adalah sektor kegiatan ekonomi orang kecil (*wong cilik*) yang juga sering disebut sektor informal yang kemudian lebih populer dengan istilah ekonomi kerakyatan. Konsep ekonomi kerakyatan adalah sebuah konsep politik-perekonomian yang memusatkan pembangunannya pada rakyat. Konsep ini menempatkan koperasi sebagai medium pencapaian hasil, tanpa mengesampingkan peranan pasar dan negara.

Definisi ekonomi kerakyatan ini merupakan suatu sistem perekonomian yang dibangun pada kekuatan ekonomi rakyat, ekonomi kerakyatan ini merupakan kegiatan atau aktivitas ekonomi yang bisa memberikan kesempatan luas bagi masyarakat untuk berpartisipasi di dalam perekonomian sehingga perekonomian bisa/dapat berjalan serta berkembang dengan baik. Sistem ekonomi kerakyatan ini diterapkan di Indonesia sejak terjadi Reformasi pada tahun 1998. Pemerintah bertekad untuk menjalankan sebuah



sistem ekonomi yang berbasis kerakyatan dengan mengeluarkan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia Nomor IV/MPR/1999 mengenai Garis-Garis Besar Haluan Negara yang menyatakan bahwa sistem perekonomian Indonesia ini ialah sistem ekonomi kerakyatan. Ekonomi rakyat (*people's economy is indigeneous economy*), bukan aktivitas perekonomian yang berasal dari luar aktivitas masyarakat (*external economy*).

Menurut Mubarto 1999 Pengertian ekonomi kerakyatan ini merupakan ekonomi yang demokratis yang ditujukan untuk kemakmuran rakyat kecil.

Menurut Zulkarnain Pengertian ekonomi kerakyatan ini merupakan suatu sistem ekonomi yang harus di anut sesuai dengan falsafah negara kita yang menyangkut 2 (dua) aspek, diantaranya keadilan dan demokrasi ekonomi, serta keberpihakan kepada ekonomirakyat.

Menurut Salim Siagian, pengertian ekonomi kerakyatan ini merupakan suatu kegiatan atau aktivitas ekonomi rakyat banyak disuatu negara atau juga daerah yang padaumumnya itu tertinggal bila/dapat dibandingkan dengan perekonomian negara atau juga daerah bersangkutan secara rata-rata

Konsep Ki Hajar di Bidang Ekonomi

- Dilakukan sebagai usaha bersama yang berasas kekeluargaan dan kemanusiaan.
- Sumber daya pokok dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat
- Distribusi hasil ekonomi disalurkan secara merata dan profesional.
- Tujuan ekonomi untuk membahagiakan diri pribadi tiap orang, seluruh bangsa Indonesia, dan umat manusia pada umumnya.

Ekonomi Kerakyatan Usaha Ekonomi Berciri Khas Pancadharmas

- Menjunjung tinggi adanya kekuasaan Tuhan yang Mahakuasa terhadap alam seisinya(kodrat alam).
- Dalam mengusahakan ekonomi harus menggunakan iptek, imtaq, etika, estetika,dan *life skill* (kebudayaan).
- Dalam mengusahakan ekonomi harus memerdekakan pikiran dan perbuatan manusia sejauh mampu menjaga tertib damainya persatuan dalam kehidupan bersama (kemerdekaan).
- Dalam mengusahakan ekonomi harus memperhatikan konsep dasar kebangsaan yaitu religius, humanistis, dan kultural (kebangsaan).
- Dalam mengusahakan ekonomi harus memperhatikan manusia sesuai kodrat, harkat, dan martabatnya (kemanusiaan).

Dalam era globalisasi yang sangat neo liberalistik maka harus dapat ditegaskan bahwa “Daulat rakyat” tidak boleh dilengserkan oleh “Daulat pasar” bahwa keadilan social adalah bagi seluruh rakyat Indonesia, bahwa tugas pemerintahan Negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan Bangsa serta ikut melaksanakan ketertiban dunia”, kesemuanya itu hanya demi rakyat Indonesia.

Ekonomi rakyat adalah riil dan konkrit, kita memiliki pertanian rakyat, perkebunan rakyat, perikanan rakyat,tambak rakyat, pelayaran rakyat, kerajinan rakyat, pertukangan rakyat, bahkan yang teramat penting bagi kehidupan sehari-hari adalah bahwa kita memiliki dan hidup dari pasar-pasar rakyat. Kita kenal pula ekonomi rakyat yang berbasis komoditi seperti kopra rakyat, kopi rakyat, karet rakyat, cengkeh rakyat,



tembakau rakyat yang menjadi penyangga atau soko guru bagi industri prosesing di atasnya.

Ekonomi rakyat mempunyai peran strategis di dalam sistem dan struktur ekonomi. Yang kita bangun adalah rakyat itu sendiri, bukan sekedar ekonominya, kemajuan dan perkembangan ekonomi harus mendukung kemajuan harkat martabat rakyat, Paham Ekonomi kerakyatan yaitu :

- a. Dasar ekonomi kerakyatan adalah demokrasi ekonomi, yaitu berdasar prinsip darirakyat, oleh rakyat dan untuk rakyat.
- b. Ekonomi kerakyatan adalah sistem perekonomian yang disusun sebuah usaha Bersama dengan dijiwai oleh azas kekeluargaan
- c. Sumber daya local yang potensial dikelola atas dasar kemandirian untuk digunakanebesar besarnya kemakmuran rakyat.
- d. Distribusi hasil produksi mengutamakan pemerataan sebagai pendorong terwujudnya masyarakat yang berkeadilan social.
- e. Perekonomian nasional disusun sebagai usaha Bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Yang dimaksud “perekonomian” bukan hanya koperasi melainkan BUMN, sektor swasta dan tak terkecuali sektor informal.
- f. Koperasi merupakan tulang punggung dan bagian integral dari perekonomian nasional yang berasaskan kekeluargaan perlu dikembangkan dan ditingkatkan perannya dalam pembangunan Nasional.

Revolusi Industri 4.0

Industri 4.0 mengacu pada fase baru dalam Revolusi Industri yang memiliki fokus pada interkoneksi, otomatisasi, pembelajaran mesin, dan data waktu nyata. Industri 4.0 disebut sebagai IoT atau manufaktur pintar, menggabungkan antara produksi dan operasi secara fisik dengan teknologi digital cerdas, pembelajaran mesin, dan data besar untuk menciptakan ekosistem secara holistik dan terhubung terutama pada perusahaan yang berfokus pada manufaktur dan manajemen rantai pasokan. Meskipun setiap perusahaan memiliki jenis dan skala yang berbeda, namun demikian setiap perusahaan menghadapi tantangan yang sama yaitu kebutuhan akan keterhubungan dan akses ke wawasan waktu nyata di seluruh proses, mitra, produk, dan orang-orang.

Tahapan revolusi industri sebagai berikut (Sun, 2018):

- a. Revolusi Industri yang pertama berlangsung 1750 - 1870 ditandai oleh *mechanisation, steam power* dan *water power*. *Entrepreneurship* fokus pada penciptaan pasar baru dan penciptaan sistem kerja (di lantai produksi)
- b. Revolusi industri yang kedua berlangsung 1870 - 1980 ditandai oleh *mass production line, assembly line & electricity*. *Entrepreneurship* fokus pada produksi massal dan perdagangan nasional internasional
- c. Revolusi industri yang ketiga berlangsung 1980 - 2011 ditandai oleh *computer automation*. *Entrepreneurship* fokus pada digitalisasi dan perusahaan yang multi nasional
- d. Revolusi industri yang keempat berlangsung 2011 - sekarang ditandai oleh *cyber physical system, the internet of things & robotics, cloud computing, cognitive computing, big data*. *Entrepreneurship* fokus pada interkoneksi bisnis, *smart otomation, drone* dan lainnya.



Era revolusi industri ke-4 ini muncul peluang sekaligus juga ada ancaman. Di dalam sebuah laporan diskusi oleh *Deutsche Post Foundation* di daerah benua Afrika, revolusi industri 4.0 telah memunculkan alternatif pengembangan teknologi di Afrika yaitu automation, additive manufacturing dan industrial internet. Ancaman dalam bentuk kehilangan pekerjaan (pemutusan hubungan pekerjaan) dan perbaikan produksi untuk negara maju. Di antara peluangnya adalah produk sebagai layanan, ekonomi berbagi (*sharing economy*), dan layanan digital dan ekspor digital. Ini adalah pasar yang saat ini kurang berkembang di Afrika tetapi memiliki potensi besar mengingat geografi, demografi, dan urbanisasi yang sedang berlangsung di Afrika. Antisipasi dari dampak negatif dari revolusi industri 4.0 berupa kehilangan pekerjaan adalah mendorong sikap entrepreneurship. Dengan demikian akan muncul bisnis-bisnis baru dengan dasar pada teknologi yang berkembang pada revolusi industri 4.0 tersebut.

Kebijakan Pemerintah perlu mengakomodasi tumbuhnya sikap dan praktek-praktek entrepreneurship sejak dunia pendidikan hingga lepas dunia pendidikan (Naude, 2017). *Marketing dan innovation* adalah faktor utama yang akan membantu UMKM untuk mengembangkan bisnis ke depan (Vorhies & Morgan, 2005 di dalam Murugiahramashini, Jayatunga D.P. & Samarasinghen P, 2017). Hal-hal utama yang mendukung kesuksesan seorang entrepreneur adalah ditinjau dari aspek demographic dengan parameter usia, pendidikan dan pengalaman dan aspek kontekstual lingkungan dengan parameter marketing, teknologi, akses pendanaan, infrastruktur, pemerintah, politik, dan akses informasi. Keseluruhan parameter kecuali usia telah terbukti secara positif menunjang kesuksesan seorang entrepreneur. (Chowdhury, A. & Arif, 2013).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Pemberdayaan ekonomi kerakyatan memiliki fokus pada kemakmuran rakyat kecil Sistem ekonomi yang diterapkan oleh suatu negara sangat mempengaruhi bagaimana kekuatan dan kondisi ekonomi di negara itu . Ekonomi rakyat adalah ekonomi yang positif, mencerminkan watak dan tatanan ekonomi dimana, pemilikan asset ekonomi harus didistribusikan kepada sebanyak-banyak warga negara yang sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 yaitu :

- a. Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan.
- b. Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara.
- c. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.
- d. Perekonomian nasional diselenggarakan berdasar atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Ciri dari sistem ekonomi kerakyatan adalah :

- a. Peranan pemerintah yang menunjang terbentuk ekonomi kerakyatan, yang tidak saja terbatas sebagai pengatur jalannya roda perekonomian melalui badan usaha negara, tetapi tujuannya adalah untuk menjamin agar kemakmuran masyarakat senantiasa lebih diutamakan daripada kemakmuran orang-seorang, dan agar tampuk produksi tidak jatuh ke tangan orang seorang, yang memungkinkan ditindasnya rakyat banyak oleh segelintir orang yang berkuasa.
- b. Efisiensi ekonomi berdasarkan keadilan, partisipasi dan berkelanjutan, kedua,



- mekanisme alokasi melalui perencanaan pemerintah, mekanisme pasar dan kerjasama.
- c. Pemerataan penguasaan faktor produksi atau peningkatan kedaulatan ekonomi rakyat menjadi substansi sistem ekonomi kerakyatan.
 - d. Pola hubungan produksi kemitraan, sebagaimana ditegaskan Bung Hatta pada koperasi tak ada majikan dan buruh, semuanya pekerja yang berkerjasama untuk menyelenggarakan keperluan bersama”, ini menunjukkan bahwa ekonomi kerakyatan tidak adanya individualistis dan kapitalistis.
 - e. Kepemilikan saham oleh pekerja. Mekanisme pasarnya, alokasi juga didorong untuk diselenggarakan melalui usaha bersama koperasi. Mekanisme pasar koperasi sama dengan sistem ekonomi kerakyatan.

Ekonomi kerakyatan menjadi penting untuk diimplementasikan di Indonesia dengan alasan :

a. Ciri khas Indonesia

Perekonomian yang diterapkan di Indonesia jelas akan berbeda dengan perekonomian yang dilaksanakan di negara lain, harus dirumuskan konsep ekonomi sendiri yang cocok dengan tuntutan politik, tuntutan konstitusi dan cocok dengan kondisi obyektif dan situasi subyektif Indonesia.

b. Sesuai dengan UUD 1945

Di dalam pasal 27 UUD 1945 dijelaskan bahwa setiap warga negara berhak untuk mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak, artinya bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan kesempatan untuk mengembangkan diri sesuai dengan bakat dan kemampuannya juga berhak untuk menikmati hasil perjuangan hidupnya secara baik. Penting untuk diperhatikan adalah ruh ekonomi yaitu usaha Bersama atas azas kekeluargaan yaitu tatanan ekonomi yang memberi kesempatan pada seluruh rakyat untuk berprestasi sebagai pelaku ekonomi, yang secara tegas membedakan barang dan jasa mana yang harus diproduksi oleh pemerintah dan mana yang harus diproduksi oleh sektor privat.

c. Empirik

Fakta menunjukkan bahwa krisis moneter yang berlanjut terhadap krisis ekonomidan nilai tukar rupiah, ternyata tidak melumpuhkan perekonomian nasional. Dampak dari krisis ini memang benar bahwa ada kenaikannya harga barang pokok, inflasi hampir tidak dapat dikenalkan, ekspor menurun, impor barang modal menurun, produksi manufaktur menurun, dan pengangguran meningkat. Namun semua itu tidak berdampak terhadap perekonomian yang berpenghasilan bukan dari hitungan uang luar negeri, karena usaha mereka tidak menggunakan bahan impor, hampir tidak mengalami guncangan yang berarti.

Kegagalan Pembangunan Ekonomi

- a. Selama kita mengalami krisis ekonomi sebanyak dua kali yaitu krisis hutang Pertamina dan krisis karena anjloknya harga minyak, rata-rata pertumbuhan ekonomi nasional masih diatas 6 persen pertahun. Berbagai program penanggulangankemiskinan telah kita laksanakan, tapi belum mampu mengatasi masalah-masalah kemiskinan. Oleh sebab itu yang kita butuh bukan program pengentasan kemiskintapi strategi pembangunan yang cocok untuk Indonesia. Kalau strategi pembangunan ekonomi yang kita tempuh benar, maka sebenarnya semua program pembanguann adalah sekaligus menjadi program penanggulangan kemiskinan. Disamping itu ekonomi kerakyatan memiliki ciri



tersebut, Indonesia memiliki sistem perekonomian nasional yang tumpuan mekanisme pasar berpegang teguh pada keadilan dengan prinsip adanya persaingan yang sehat. Dengan demikian seluruh masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh pendapatan. Tujuan yang akan dicapai dari penguatan ekonomi kerakyatan adalah untuk melaksanakan amanat konstitusi, khususnya mengenai :

- b. Perwujudan tata ekonomi yang disusun sebagai usaha bersama yang berasaskan kekeluargaan yang menjamin keadilan dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 ayat 1.
- c. Perwujudan konsep Trisakti yaitu, berdikari di bidang ekonomi, berdaulat di bidang politik dan berkepribadian di bidang kebudayaan.
- d. Perwujudan cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan menguasai hajat hidup rakyat banyak dikuasai negara, tercantum pada UUD 1945 pasal 33 ayat 2.
- e. Perwujudan amanat bahwa tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak, tercantum pada UUD 1945 pasal 27 ayat 2, Sedangkan untuk pencapaian tujuan khusus:
 - 1) Membangun Indonesia yang berdikari secara ekonomi, berdaulat secara politik, dan berkepribadian yang berkebudayaan
 - 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan.
 - 3) Mendorong pemerataan pendapatan rakyat dan meningkatkan efisiensi perekonomian secara nasional.

Merujuk dari tujuan di atas maka yang menjadi watak dari ekonomi Indonesia adalah ekonomi kerakyatan, di mana segala asset dan kekayaan yang dimiliki sebesar besarnya untuk kemakmuran rakyat, didistribusikan secara adil, merata serta mampu menjamin kesejahteraan rakyat. Catatan yang harus diperhatikan dalam pengelolaan ekonomi adalah teori ekonomi *invisible hand* dikemukakan oleh Adam Smith (1976) intinya kompetisi diantara para distributor atau penjual dan pembeli yang akan menghasilkan relativitas atau kemungkinan terbaik dalam transaksi. Karena hal itu dapat mendorong semua orang untuk melakukan kualifikasi dan peningkatan investasi sehingga yang akhirnya akan menghasilkan nilai lebih dengan tenaga kerja yang fixed atau tetap.

Menurut teori ekonomi *invisible hand* akan berjalan dengan baik apabila tidak ada yang kekuatan pemerintahan yang campur tangan. Karena masing-masing bidang baik yang kecil maupun yang besar akan bersaing dalam bidang masing-masing di luar monopoli.

Dengan demikian dapat dilihat secara khusus bahwa tujuan dari ekonomi kerakyatan, diantaranya

- a. Untuk membangun negara yang berdikari secara ekonomi, yang berdaulat secara politik, serta memiliki berkepribadian yang berkebudayaan,
- b. Untuk mendorong pemerataan pendapatan masyarakat,
- c. Dapat mendorong pertumbuhan perekonomian yang berkesinambungan,
- d. Dan untuk meningkatkan efisiensi perekonomian nasional

Ekonomi kerakyatan adalah tatanan ekonomi di mana aset ekonomi dalam perekonomian nasional didistribusikan kepada sebanyak-banyaknya warga negara. Dengan demikian ekonomi kerakyatan penguat bagi :

- a. Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan pertumbuhan output perekonomian



suatu negara secara mantap dan berkesinambungan, dan dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat.

- b. Tata ekonomi yang dapat menjamin pertumbuhan output secara mantap atau tinggi adalah tata ekonomi yang sumber daya ekonominya digunakan untuk memproduksi jasa dan barang pada tingkat *pareto optimum*. Tingkat *pareto optimum* adalah tingkat penggunaan faktor-faktor produksi secara maksimal dan tidak ada faktor produksi yang ngangur atau *idle*.
- c. Tata ekonomi yang dapat menjamin *pareto optimum* adalah tata ekonomi yang mampu menciptakan penggunaan tenaga kerja secara penuh (*full employment*) dan mampu menggunakan kapital atau modal secara penuh
- d. Tata ekonomi yang dapat memberikan jaminan keadilan bagi rakyat tata ekonomi yang pemilikan aset ekonomi nasional terdistribusi secara baik kepada seluruh rakyat, sehingga sumber penerimaan (*income*) rakyat tidak hanya dari penerimaan upah tenaga kerja, tetapi juga sewa modal dan dividen. Secara ekonomis, dalam perekonomian kerakyatan, model income masyarakat adalah $YI = (W + \delta + is)$. Dimana YI adalah *income* individu, W adalah penerimaan dari upah tenaga kerja, δ adalah penerimaan dividen atau bagi hasil usaha, i adalah tingkat sewa modal (misalnya deposito), dan s adalah jumlah tabungan atau *endowment* yang disewakan. Dengan demikian dalam tata ekonomi kerakyatan, masyarakat bukan hanya sebagai buruh dalam perekonomian tetapi juga pemilik atau memiliki saham di sektor produksi

Berdasarkan tata ekonomi kerakyatan maka dapat dilihat bahwa ada beberapa kelebihan dari sistem ekonomi kerakyatan yaitu:

- a. Rakyat yang kurang mampu bisa mendapatkan perlakuan hukum yang sama atausecara adil dalam masalah perekonomian.
- b. Dapat memberikan perhatian yang lebih pada rakyat kecil melalui berbagai macam program operasional yang nyata.
- c. Sistem ekonomi ini dapat mewujudkan kedaulatan rakyat
- d. Dapat merangsang kegiatan ekonomi yang lebih produktif di tingkat rakyat sekaligus dapat melahirkan jiwa kewirausahaan.
- e. Transaksi antara produksi, distribusi dan konsumsi sangat baik.
- f. Hubungan antara produksi, distribusi dan juga konsumsi akan saling membutuhkan sangat baik

Sistem ekonomi kerakyatan tidak hanya berhenti pada tingkat wacana, sejumlah agenda kongkrit ekonomi kerakyatan harus segera diangkat kepermukaan. Secara garis besar dalam lima agenda pokok ekonomi kerakyatan yang harus segera diperjuangkan. Kelima agenda tersebut merupakan inti dari politik ekonomi kerakyatan dan menjadi titikmasuk (*entry point*) bagi terselenggaranya sistem ekonomi kerakyatan dan dalam jangka panjang. Kelima hal tersebut adalah⁷ :

- a. Penghapusan monopoli melalui penyelenggaraan mekanisme.
- b. Persaingan yang berkeadilan (*fair competition*).
- c. Peningkatan alokasi sumber penerimaan Negara kepada pemerintah daerah.
- d. Penguasaan dan redistribusi pemilikan lahan pertanian kepada petani penggarap.
- e. Pembaharuan UU Koperasi dan pendirian koperasi dalam berbagai bidang usaha dan kegiatan.

Hal yang perlu dicermati adalah peningkatan kesejahteraan rakyat dalam



konteks ekonomi kerakyatan tidak didasarkan paradigma lokomotif, melainkan pada paradigma fondasi. Artinya, peningkatan kesejahteraan tidak lagi bertumpu pada dominasi pemerintah pusat, modal asing dan perusahaan konglomerasi, melainkan pada kekuatan pemerintah daerah, persaingan yang berkeadilan, usaha pertanian rakyat, peran koperasi sejati, yang diharapkan mampu berperan sebagai fondasi penguatan ekonomi rakyat. Strategi pembangunan yang memberdayakan ekonomi rakyat merupakan strategi melaksanakan demokrasi ekonomi yaitu produksi dikerjakan oleh semua pimpinan dan peilikan anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat lebih diutamakan ketimbang kemakmuran perorangan. Maka kemiskinan tidak dapat ditoleransi sehingga setiap kebijakan dan program pembangunan harus member manfaat pada mereka yang paling miskin dan paling kurang sejahtera. Inilah pembangunan generasi mendatang sekaligus memberikan jaminan sosial bagi yang paling miskin dan tertinggal.

Setiap daerah mempunyai corak pertumbuhan ekonomi yang berbeda dengan daerah lain. Oleh sebab itu perencanaan pembangunan ekonomi suatu daerah pertamanya perlu mengenai karakter ekonomi, sosial dan fisik daerah itu sendiri, termasuk interaksinya dengan daerah lain. Dengan demikian tidak ada strategi pembangunan ekonomi daerah, baik jangka pendek maupun jangka panjang. Pemahaman mengenai teori pertumbuhan ekonomi wilayah yang dirangkum dari kajian terhadap pola-pola pertumbuhan ekonomi dari berbagai wilayah, merupakan satu faktor yang cukup menentukan kualitas rencana pembangunan ekonomi daerah. Daya saing (*competitiveness*) merupakan salah satu kata kunci yang lekat dengan pembangunan ekonomi lokal/ daerah.

Camagni (2002) mengungkapkan bahwa daya saing daerah kini merupakan salah satu isu sentral, terutama dalam rangka mengamankan stabilitas ketenagakerjaan, dan memanfaatkan integrasi eksternal (kecenderungan global), serta keberlanjutan pertumbuhan kesejahteraan dan kemakmuran lokal. Daya saing tempat (loyalitas dan daerah) merupakan kemampuan ekonomi dan masyarakat lokal untuk memberikan peningkatan standar hidup bagi warga (Malecki, 1999). Daya saing merupakan kemampuan menghasilkan produk barang dan jasa yang memenuhi pengujian internasional, dan dalam saat kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan yang tinggi dan berkelanjutan, atau kemampuan daerah menghasilkan tingkat pendapatan dan kesempatan kerja yang tinggi dengan tetap terbuka terhadap persaingan eksternal (European Commission, 1999). Terkiat dengan optimalisasi ekonomi kerakyatan, jelas akan memicu peningkatan daya saing daerah, karena jika telah berdaulat secara ekonomi maka daerah itu akan cukup kokoh menahan gempuran goncangan ekonomi eksternal.

Dalam penerapan dan pelaksanaan ekonomi kerakyatan juga mengacu pada ekonomi kerakyatan yang diajarkan oleh Ki Hajar Dewantara dengan konsep :

- a. Dilakukan sebagai usaha bersama yang berasas kekeluargaan dan kemanusiaan. Hal ini merupakan perwujudan dari UU No 25 Tahun 1992 tentang Koperasi yaitu bahwa bahwa Koperasi, baik sebagai gerakan ekonomi rakyat maupun sebagai badan usaha berperan serta untuk mewujudkan masyarakat yang maju, adil dan makmur berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam tata perekonomian nasional yang disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan dan demokrasi ekonomi, sehingga pelaksanaan ekonomi kerakyatan yang di ajarkan Ki Hajar Dewantara sesuai dengan UU No 25 Tahun 1992 juga UUD 1945 khususnya pasal 33.



- b. Sumber daya pokok dikuasai negara dan digunakan untuk sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan kebahagiaan rakyat, hal ini sesuai pasal 33 UUD 1945 ayat 3 yaitu kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat. Contoh misalnya mineral dan batubara sebagai kekayaan alam yang terkandung di dalam bumi merupakan sumber daya alam yang tak terbarukan, pengelolaannya perlu dilakukan seoptimal mungkin, efisien, transparan, berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta berkeadilan agar memperoleh manfaat sebesar-besar bagi kemakmuran rakyat secara berkelanjutan
- c. Distribusi hasil ekonomi disalurkan secara merata dan profesional artinya bahwa pemerataan distribusi merupakan salah satu sarana untuk mewujudkan keadilan, di mana Islam menghendaki kesamaan pada manusia dalam memperoleh peluang untuk mendapatkan harta kekayaan tanpa memandang status social.
- d. Tujuan ekonomi untuk membahagiakan diri pribadi tiap orang, seluruh bangsa Indonesia, dan umat manusia pada umumnya, hal ini juga sesuai dengan yang disampaikan oleh Khan 1994

Tabel 1. Aspek Makro dan Aspek Mikro dalam Falah

Unsur Falah	Aspek Makro	Aspek Mikro
Kelangsungan hidup (biologi, ekonomi, sosial, politik)	<ul style="list-style-type: none"> - Kesehatan, kebebasan keturunan, dsb - Kepemilikan faktor produksi - Persaudaraan dan harmoni hubungan sosial - Kebebasan dalam partisipasi politik 	<ul style="list-style-type: none"> - Keseimbangan ekologi dan lingkungan - Pengelolaan sumber daya alam - Penyediaan kesempatan berusaha untuk semua penduduk - Kebersamaan sosial, ketiadaan konflik antarkelompok
Kebebasan berkeinginan	<ul style="list-style-type: none"> - Terbebas dari kemiskinan - Kemandirian hidup 	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan sumber daya untuk seluruh penduduk dan untuk generasi yang akan datang
Kekuatan dan harga diri	<ul style="list-style-type: none"> - Harga diri - Kemerdekaan, perlindungan terhadap hidup dan kehormatan 	<ul style="list-style-type: none"> - Kekuatan ekonomi dan kebebasan dari utang - Kekuatan militer

Sumber : Khan 1994

Usaha ekonomi berciri khas Pancadharmas

Menjunjung tinggi adanya kekuasaan Tuhan yang Mahakuasa terhadap alam seisinya (kodrat alam). Dalam mengusahakan ekonomi harus menggunakan iptek, imtaq, etika, estetika, dan *life skill* (kebudayaan).

Dalam mengusahakan ekonomi harus memerdekakan pikiran dan perbuatan manusia sejauh mampu menjaga tertib damainya persatuan dalam kehidupan bersama



(kemerdekaan).

Dalam mengusahakan ekonomi harus memperhatikan konsep dasar kebangsaan yaitu religius, humanistik, dan kultural (kebangsaan).

Dalam mengusahakan ekonomi harus memperhatikan manusia sesuai kodrat, harkat, dan martabatnya (kemanusiaan)

Ekonomi Kerakyatan sangat terasa bisa dilihat pada kelompok masyarakat pedesaan, seperti yang ada pada masyarakat di Desa Tepansari, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah, kesederhanaan masyarakat, tetapi memiliki sumber daya alam yang sangat potensial, sudah tersentuh oleh teknologi maka telah mengantarkan masyarakat untuk mampu mengelola sumber daya alam mengikuti perkembangan teknologi saat ini dengan tetap mempertimbangkan kekhasan dari masyarakat, contohnya mereka mampu membuat mesin pencacah rumput sendiri, membuat mesin perontok padi sendiri, membuat olahan kelapa sendiri, memiliki peternakan yang modern, dan membuat alat pemberi pakan ikan otomatis, alat penjemur hama, dan juga membuat pupuk organik yang disebut *nitrobacter*, Pemakaian *nitrobacter* pada tanaman, tanaman akan jauh lebih sehat, daunnya menjadi lebih hijau dan terhindar dari serangan layu fusarium, layu daun, daun kuning, dan daun keriting. *Nitrobacter* yang diaplikasikan langsung pada tanah, dapat mengubah tanah tandus menjadi tanah yang lebih subur dan gembur. inilah bentuk dan bukti perekonomian masyarakat melalui Pemberdayaan Ekonomi Kerakyatan Berdasarkan Ajaran Tamansiswa Menuju Revolusi industri 4.0 di Desa Tepansari, Kecamatan Loano, Kabupaten Purworejo, Jawa Tengah Indoensia.

4. KESIMPULAN

Perekonomian di Indonesia berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945 yang di kuatkan dengan sistem ekonomi Kerakyatan yang di sampaikan Ki Hajar Dewantara sebagai dasar penerapan perkeonomian Indonesia yang sesuai dengan potensi alam, kemampuan masyarakat, latar belakang masyarakat, kebutuhan masyarakat menuju perekonomian era industri 4.0. Menghadapi era industri bukan berarti meninggalkan budaya, potensi dan ciri khas ke Indonesiaannya, tetapi justru harus semakin di tajamkan sebagai kekhasan ekonomi Indonesia, generasi muda sebagai penerus pelaku ekonomi memiliki dasar bersikap, bertindak sehingga amanah pasal 27, pasal 33 UUD 1945 serta ajaran Ki Hajar Dewantara tetap mmenjadi pedoman bagi generasi bangsa Indonesiayang memiliki modal kekayaan alam yang sangat potensial sehingga akhirnya menjadi modal menguatkan Bangsa Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abd. Rahman . H. Abd.Rahim. 2013, Wakil Rektor I Unismuh Makassar “Sistem Ekonomi Kerakyatan dan Daya Saing Ekonomi Daerahdisampaikan pada acara Seminar Nasional di Auditorium Al-Amien Unismuh Makassar. Senin 18 Maret 2013
- Buku Saku Tamansiswa Badan perjuangan Kebudayaan dan Pembangunan Masyarakat, UST Press;2017
- Bayu. 2011. Makalah sistem ekonomi kerakyatan, <http://cafeekonomi.blogspot.com/search/label/Sistem%20Ekonomi%20Kerakyata%20Indonesia>
- Chowdhury, M.S., Alam, Z., Arif, M.I. 2013. Success factors of entrepreneurs of small and medium sized enterprises: evidence from Bangladesh. Business and Economic



- Research, 3(2): 38-52. doi: <http://dx.doi.org/10.5296/ber.v3i2.4127>
Data Statistik Desa Tepansari Kecamatan Loano Kabupaten Purworejo:2022
Hesti dkk; Jurnal Manajemen dan Bisnis Volume 16 No 2 April 2020 Edisi Khusus
Ekonomi dan Bisnis di Era RI 4.0 p-ISSN: 0216-938X e-ISSN: 2684-8414
Jurnal Ekonomi Kerakyatan Fifi Hasmawati Dosen Fakultas Dakwah Dan Komunikasi
UINSU Medan.
Mubyarto. 1999. Reformasi Sistem Ekonomi : Dari Kapitalisme Menuju Ekonomi
Kerakyatan, Yogyakarta : Aditya Media.
Murugiahramashini, Jayatunga,D.P. &Samarasinghen,P. 2017. *Big data analyzed marketing
strategies for Srilankan Smalland Medium Enterprises*. International Journal of
Advances in Electronics and Computer Science. 4(4): 10-14
Naude. 2017. Entrepreneurship, Education and the Fourth Industrial Revolution in Africa,
Discussion Paper Series, Institute of Labor Economics.
Sun. 2018. Innovation & Enterpreneurship in the 4th Industrial Revolution, Joint Workshop
on Enterpreneurship, Lae, PNG, 18 July 2018
Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Nomor IV/MPR/ 1999 Tentang Garis-Garis
Besar Haluan Negara Sekretariat Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan
Bencana dan Penanganan PengungsiTahun 1999
Undang-Undang No. 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)
Aditya, Galuh. 2012. Outsourcing Sebagai Sarana Penyedia SDM TI Yang Profesional Pada
Usaha Kecil Dan Menengah. Progress: Jurnal Manajemen dan Akuntansi. Volume
8, nomor 2, Januari 2012. [http://www.stierajawali.ac.id/artikel_ jurnal/outsourcing-
sebagai-sarana penyedia-sdm-ti-yang-profesional pada-usaha-kecil-dan-menengah](http://www.stierajawali.ac.id/artikel_jurnal/outsourcing-sebagai-sarana-penyedia-sdm-ti-yang-profesional-pada-usaha-kecil-dan-menengah)

<https://www.ui.ac.id/memahami-gagasan-ekonomi-kerakyatan-bung-hatta/>.Diakses pada
tanggal 20 Juni 2022.

<http://catatan-manusia.blogspot.com/> . Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

<https://fe.ustjogja.ac.id/index.php?r=berita/index&id=200>. Diakses pada tanggal 20 Juni
2022.

<http://catatan-manusia.blogspot.com/2013/12/ketamansiswaan-i-konsep-ekonomi-asas.html>.
Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

<https://islamic-economics.uui.ac.id/ekonomi-kebahagiaan-dan-ekonomi-islam/>
Diakses pada tanggal 20 Juni 2022.

<http://s://succesarry.wordpress.com/sistim-ekonomi-kerakyatan/> mardiyatmohutomo. Diakses
pada tanggal 20 Juni 2022.